



Pengaruh Digitalisasi Administrasi Desa dan Kompetensi Digital terhadap Kinerja Pelayanan Perangkat Desa di Kabupaten Kerinci

Iis Azelya*

Universitas Bangka Belitung

Alamat: Balunijuk, Merawang, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Korespondensi penulis: azelya@ubb.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi administrasi desa dan kompetensi digital terhadap kinerja pelayanan perangkat desa di Kabupaten Kerinci. Metode pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan dari 50 responden yang merupakan perangkat desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Kerinci. Variabel yang dikaji meliputi digitalisasi administrasi desa (X_1), kompetensi digital (X_2), dan kinerja pelayanan perangkat desa (Y). Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi desa dan kompetensi digital secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan perangkat desa. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,428 menunjukkan bahwa kedua variabel independen menjelaskan 42,8% variasi dalam kinerja pelayanan. Secara parsial, digitalisasi administrasi memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan kompetensi digital. Kesimpulan temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Keywords: Kompetensi digital, kinerja pelayan publik, digitalisasi administrasi desa, perangkat desa, Kabupaten Kerinci

PENDAHULUAN

Transformasi digital di sektor pemerintahan desa telah menjadi agenda nasional sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Kementerian PAN-RB, 2018). Pemerintah pusat melalui Kantor Staf Presiden (KSP) juga mencanangkan target 100% digitalisasi desa pada tahun 2025, seiring dengan peluncuran Program Desa Digital pada tahun 2020 (KSP, 2023).

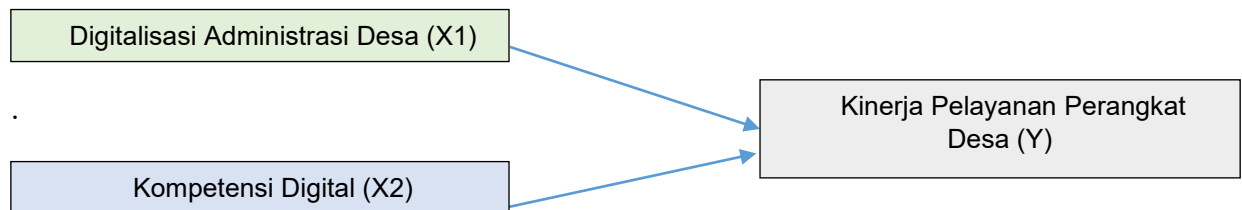
Kabupaten Kerinci, sebagai wilayah pegunungan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari desa, turut beradaptasi dengan arah kebijakan nasional tersebut. Penjabat Bupati Kerinci dalam berbagai forum menyampaikan bahwa digitalisasi administrasi desa merupakan salah satu fokus dalam meningkatkan kualitas layanan publik (Pemerintah Kabupaten Kerinci, 2024). Namun demikian, realisasi digitalisasi di tingkat desa belum optimal, terutama karena keterbatasan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.

Beberapa studi menyoroti bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, khususnya kompetensi digital perangkat desa (Assaf & Abbas, 2021; Mohamad et al., 2024). Kompetensi ini mencakup kemampuan mengoperasikan aplikasi administrasi, mengelola data digital, serta menyampaikan informasi pelayanan publik secara daring. Jika kompetensi digital rendah, maka sistem digital yang telah disediakan pun tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal (Ombudsman RI, 2022).

Di sisi lain, permasalahan dalam kinerja pelayanan publik desa masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Ombudsman RI (2020), terdapat peningkatan jumlah pengaduan masyarakat terkait lambannya pelayanan administratif di tingkat desa. Hal ini mencerminkan adanya inefisiensi dalam proses pelayanan, termasuk dalam hal pengurusan dokumen dan penyampaian informasi. Digitalisasi administrasi diyakini mampu mengatasi kendala tersebut, terutama dalam hal kecepatan pelayanan, akurasi data, dan transparansi proses.

Penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan digitalisasi desa secara umum, seperti studi Mohamad et al. (2024) di Desa Tabumela yang menemukan peningkatan efisiensi dan transparansi akibat digitalisasi. Namun, kajian kuantitatif yang secara spesifik menguji pengaruh digitalisasi administrasi dan kompetensi digital terhadap kinerja pelayanan perangkat desa masih terbatas, khususnya di wilayah Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman empiris terhadap keterkaitan antara digitalisasi, kompetensi digital, dan kinerja pelayanan, sebagai dasar perumusan kebijakan dan program penguatan kapasitas aparatur desa ke depan.

Secara garis besar kerangka pikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Digitalisasi administrasi desa berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan perangkat desa
- H2: Kompetensi digital berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan perangkat desa
- H3: Digitalisasi administrasi desa dan kompetensi digital secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan perangkat desa

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan mendasar dalam sistem tata kelola pemerintahan di berbagai negara. Pemerintahan modern tidak lagi

bertumpu pada prosedur administratif manual, melainkan pada sistem berbasis teknologi yang menekankan kecepatan, ketepatan, dan transparansi. Transformasi digital dalam sektor publik dipahami sebagai proses reorganisasi kerja pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara strategis. Berawi (2017) menjelaskan bahwa digitalisasi pemerintahan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi kelembagaan dan kualitas layanan publik. Dalam konteks tersebut, transformasi digital menjadi bagian integral dari agenda reformasi birokrasi kontemporer (Chung et al., 2016).

Digitalisasi administrasi desa merupakan upaya sistematis untuk mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Proses ini mencakup pengelolaan data kependudukan, pencatatan keuangan desa, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat. Penerapan digitalisasi di tingkat desa menjadi penting karena desa merupakan unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Kementerian PAN-RB (2018) menegaskan bahwa digitalisasi desa adalah bagian dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi desa berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal.

Tujuan utama digitalisasi administrasi desa adalah menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efisien dan akuntabel. Sistem digital memungkinkan proses administrasi dilakukan secara terstandar dan terdokumentasi dengan baik. Penelitian Mohamad et al. (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi desa mampu mengurangi waktu pelayanan dan meningkatkan ketepatan pengelolaan data. Selain itu, sistem digital memberikan kemudahan dalam pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur desa. Dengan demikian, digitalisasi berfungsi sebagai alat strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Ombudsman RI, 2022).

Implementasi digitalisasi administrasi desa tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural dan teknis. Keterbatasan infrastruktur teknologi masih menjadi persoalan utama di banyak wilayah pedesaan. Selain itu, rendahnya literasi digital aparatur desa turut menghambat optimalisasi sistem digital. Assaf dan Abbas (2021) menekankan bahwa kesenjangan kompetensi sumber daya manusia sering kali menjadi faktor penentu kegagalan digitalisasi pemerintahan di wilayah rural. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi desa memerlukan pendekatan yang berorientasi pada pembangunan kapasitas manusia, bukan hanya penyediaan teknologi.

Kompetensi digital merupakan konsep multidimensi yang mencerminkan kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Kompetensi ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup pemahaman informasi, komunikasi digital, dan keamanan data. Carretero et al. (2017) mendefinisikan kompetensi digital sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam penggunaan teknologi digital. Dalam organisasi publik, kompetensi digital menjadi prasyarat penting bagi efektivitas kerja aparatur. Tanpa kompetensi digital yang memadai, pemanfaatan teknologi cenderung bersifat terbatas dan tidak berkelanjutan (Cheng, 2010).

Dalam konteks pemerintahan desa, kompetensi digital aparatur memiliki peran yang sangat krusial. Aparatur desa dituntut mampu mengoperasikan aplikasi administrasi dan sistem informasi desa secara mandiri. Selain itu, mereka juga harus mampu mengelola data digital dan menyampaikan informasi pelayanan kepada masyarakat secara daring. Carretero et al. (2017) menyatakan bahwa kompetensi digital juga mencakup kesadaran terhadap etika dan keamanan digital. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi digital aparatur desa harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kompetensi digital memiliki hubungan positif dengan produktivitas kerja individu. Aparatur yang memiliki kemampuan digital yang baik cenderung lebih efisien dalam menyelesaikan tugas administratif. Gompers et al. (2016) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi secara optimal mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dalam sektor publik, peningkatan kompetensi digital berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi digital merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah (Chung et al., 2016).

Kinerja pelayanan publik menggambarkan tingkat keberhasilan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kinerja pelayanan mencakup aspek kecepatan, ketepatan, kualitas layanan, dan kepuasan masyarakat. Robbins dan Judge (2017) menyatakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh kemampuan individu dan sistem kerja yang mendukung. Dalam pemerintahan desa, kinerja pelayanan menjadi indikator utama kualitas tata kelola desa. Oleh sebab itu, peningkatan kinerja pelayanan publik menjadi tujuan utama digitalisasi administrasi desa.

Kinerja pelayanan perangkat desa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kompetensi aparatur, motivasi kerja, dan pemanfaatan teknologi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kebijakan pemerintah dan dukungan infrastruktur. Ombudsman RI (2020) mencatat bahwa lemahnya sistem administrasi dan rendahnya kapasitas aparatur menjadi penyebab utama rendahnya kualitas pelayanan desa. Dengan demikian, perbaikan kinerja pelayanan membutuhkan intervensi yang bersifat sistemik.

Digitalisasi administrasi desa memiliki implikasi langsung terhadap kinerja pelayanan publik. Sistem digital memungkinkan proses administrasi berjalan lebih cepat dan terkontrol. Cheng (2010) menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam administrasi publik meningkatkan efisiensi organisasi. Dalam konteks desa, digitalisasi membantu mengurangi birokrasi manual yang berbelit. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan (Mohamad et al., 2024).

Keberhasilan digitalisasi administrasi sangat bergantung pada kompetensi digital pengguna sistem. Aparatur desa yang memiliki kompetensi digital tinggi lebih mampu mengoptimalkan fungsi sistem digital. Assaf dan Abbas (2021) menyatakan bahwa rendahnya kompetensi aparatur menjadi penyebab utama kegagalan e-government di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi digital harus menjadi prioritas dalam program digitalisasi desa. Kompetensi digital memungkinkan aparatur desa bekerja lebih adaptif dan responsif.

Digitalisasi administrasi dan kompetensi digital tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Teknologi menyediakan sarana, sementara sumber daya manusia memastikan teknologi tersebut dimanfaatkan secara efektif. Kusri et al. (2021) menegaskan bahwa transformasi digital yang berhasil mensyaratkan keseimbangan antara sistem teknologi dan kapasitas manusia. Tanpa sinergi tersebut, digitalisasi berpotensi meningkatkan beban kerja aparatur. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas SDM harus berjalan seiring dengan pengembangan sistem digital.

Digitalisasi desa di Indonesia merupakan bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah menargetkan penerapan sistem digital di seluruh desa sebagai upaya memperkuat tata kelola lokal. Namun, implementasi kebijakan tersebut menunjukkan variasi antar wilayah. KSP (2023) mencatat bahwa

keberhasilan digitalisasi desa sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparatur desa. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kajian empiris mengenai digitalisasi administrasi desa.

Wilayah pegunungan memiliki tantangan tersendiri dalam implementasi digitalisasi administrasi desa. Akses jaringan internet yang terbatas menjadi kendala utama. US EPA (2010) menyebutkan bahwa wilayah terpencil memerlukan strategi digitalisasi yang adaptif terhadap kondisi lokal. Kabupaten Kerinci sebagai wilayah pegunungan mencerminkan tantangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian di wilayah ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan digitalisasi desa.

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi administrasi desa dan kompetensi digital aparatur merupakan determinan utama kinerja pelayanan perangkat desa. Digitalisasi menyediakan sistem kerja modern, sedangkan kompetensi digital memastikan sistem tersebut dimanfaatkan secara optimal. Hubungan kedua variabel tersebut membentuk dasar teoretis penelitian ini. Kerangka teoretis ini digunakan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi administrasi desa dan kompetensi digital terhadap kinerja pelayanan perangkat desa di Kabupaten Kerinci (Robbins & Judge, 2017; Mohamad et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel digitalisasi administrasi desa dan kompetensi digital terhadap kinerja pelayanan perangkat desa. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi, tetapi juga menguji hubungan antar variabel yang telah dirumuskan dalam hipotesis.

Objek penelitian ini adalah perangkat desa yang berada di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Subjek penelitian meliputi kepala urusan, kepala seksi, sekretaris desa, dan staf administrasi yang aktif bertugas dalam urusan pelayanan publik. Pemilihan wilayah Kerinci didasarkan pada karakteristik geografis dan tantangan digitalisasi desa di daerah pegunungan, serta relevansi kebijakan digitalisasi pemerintah daerah yang sedang berlangsung.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas dua komponen, yaitu digitalisasi administrasi desa (X_1) dan kompetensi digital perangkat desa (X_2). Digitalisasi administrasi desa diukur berdasarkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data penduduk, sistem pelaporan keuangan, penggunaan aplikasi pelayanan, dan komunikasi antar perangkat desa. Sementara itu, kompetensi digital mengacu pada kemampuan individu dalam mengoperasikan perangkat lunak dasar, memahami sistem informasi desa, serta menggunakan media digital secara efektif untuk menunjang pelayanan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pelayanan perangkat desa (Y), yang diukur berdasarkan persepsi responden terkait kecepatan layanan, ketepatan administrasi, kepuasan masyarakat, dan kemampuan menyelesaikan tugas sesuai prosedur. Ketiga variabel ini diukur menggunakan instrumen kuesioner berbasis skala Likert 1–5, di mana responden memberikan tingkat kesetujuan terhadap pernyataan yang disusun berdasarkan indikator teoritis.

Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan kajian literatur terdahulu yang relevan. Indikator untuk variabel digitalisasi administrasi desa mengacu pada kerangka SPBE (Kementerian PAN-RB, 2018), sementara indikator kompetensi digital mengacu

pada European Digital Competence Framework (Carretero et al., 2017). Untuk variabel kinerja pelayanan, peneliti mengadaptasi indikator dari Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta referensi ilmiah dari Robbins dan Judge (2017) tentang perilaku organisasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner daring (online questionnaire). Instrumen dikirim melalui tautan Google Form yang dibagikan kepada responden melalui grup WhatsApp dan email resmi desa. Pengumpulan data dilaksanakan selama bulan Mei–Juni 2025. Penggunaan metode daring dipilih karena mempertimbangkan efisiensi waktu, biaya, dan kemudahan akses pada wilayah yang memiliki konektivitas internet memadai.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan meliputi: (1) berstatus sebagai perangkat desa aktif, (2) pernah menggunakan sistem digital dalam pelayanan administrasi, dan (3) bersedia mengisi kuesioner secara mandiri. Jumlah sampel minimum yang ditetapkan adalah 30 responden, sesuai dengan batas minimal untuk analisis regresi sederhana (Sugiyono, 2018). Namun, jumlah ini dapat ditingkatkan selama masa pengumpulan data masih berlangsung.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil responden dan distribusi jawaban terhadap setiap indikator variabel. Sementara itu, analisis inferensial dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan regresi linier berganda. Uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dilakukan sebelum pengujian hipotesis untuk memastikan validitas model regresi.

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y	: Kinerja Pelayanan Perangkat Desa
X ₁	: Digitalisasi Administrasi Desa
X ₂	: Kompetensi Digital
β ₀	: Konstanta
β ₁ , β ₂	: Koefisien regresi
ε	: Error/galat

Dengan menggunakan model ini, peneliti dapat mengukur seberapa besar kontribusi digitalisasi dan kompetensi digital terhadap variasi kinerja pelayanan perangkat desa di Kabupaten Kerinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Deskripsi Responden

Sebanyak 50 perangkat desa menjadi responden dalam penelitian ini. Mereka berasal dari berbagai desa di wilayah administratif Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Komposisi responden terdiri dari 28% sekretaris desa, 34% kepala urusan atau seksi, dan sisanya merupakan staf administrasi dan operator. Sebagian besar responden berusia antara 30–45 tahun dan telah bekerja lebih dari lima tahun, yang mencerminkan pengalaman kerja yang cukup dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Sebagian besar desa tempat responden bertugas telah mulai menerapkan sistem informasi berbasis digital, setidaknya untuk pencatatan data penduduk dan pelaporan

kegiatan desa. Namun, tingkat adopsi teknologi bervariasi antar desa, tergantung pada faktor infrastruktur dan kebijakan pimpinan desa masing-masing. Sebagian responden menyatakan belum semua layanan administrasi berjalan secara daring, tetapi sudah terdapat upaya untuk mengintegrasikan sistem digital secara bertahap.

II. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif dilakukan terhadap tiga variabel utama, yaitu digitalisasi administrasi desa (X_1), kompetensi digital (X_2), dan kinerja pelayanan perangkat desa (Y). Digitalisasi administrasi desa memiliki skor rata-rata 3,89 dari skala 1–5, yang berarti responden cukup setuju bahwa penggunaan teknologi informasi mulai menjadi bagian dari proses kerja mereka. Simpangan baku sebesar 0,46 menunjukkan persebaran jawaban yang relatif konsisten antarresponden. Rangkuman hasil deskriptif ketiga variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Min	Maks	Rata-rata	Std. Deviasi
Digitalisasi Administrasi	3 .0	5 .0	3. 89	0. 46
Kompetensi Digital	2 .8	5 .0	3. 75	0. 50
Kinerja Pelayanan	3 .2	5 .0	4. 01	0. 42

Kompetensi digital perangkat desa juga tergolong cukup tinggi, dengan nilai rata-rata 3,75 dan simpangan baku 0,50. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar perangkat telah memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan aplikasi perkantoran dan sistem informasi desa, meskipun tidak semua merasa sepenuhnya mahir. Responden menyatakan bahwa mereka masih membutuhkan pelatihan lanjutan untuk penggunaan aplikasi yang lebih kompleks.

Sementara itu, kinerja pelayanan perangkat desa mendapatkan nilai rata-rata 4,01 dengan simpangan baku 0,42. Skor ini mencerminkan persepsi positif terhadap kinerja mereka sendiri, terutama dalam hal ketepatan waktu, kejelasan prosedur, dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Meskipun demikian, beberapa responden mengakui bahwa kendala jaringan internet dan keterbatasan peralatan masih menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan optimal.

III. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk menilai sejauh mana setiap butir pernyataan mampu mengukur konstruk yang dimaksud. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi Pearson Product Moment antara skor item dengan skor total konstruk.

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel*	Keterangan
Digitalisasi Administrasi Desa	X 1.1	0. 614	0. 361	V alid

	X 1.2	0. 655	0. 361	V alid
	X 1.3	0. 609	0. 361	V alid
	X 1.4	0. 688	0. 361	V alid
	X 1.5	0. 599	0. 361	V alid
Kompetensi Digital	X 2.1	0. 626	0. 361	V alid
	X 2.2	0. 635	0. 361	V alid
	X 2.3	0. 654	0. 361	V alid
	X 2.4	0. 611	0. 361	V alid
	X 2.5	0. 642	0. 361	V alid
Kinerja Pelayanan	Y 1	0. 668	0. 361	V alid
	Y 2	0. 701	0. 361	V alid
	Y 3	0. 672	0. 361	V alid
	Y 4	0. 659	0. 361	V alid
	Y 5	0. 687	0. 361	V alid

Berdasarkan hasil uji, seluruh item dari variabel Digitalisasi Administrasi Desa, Kompetensi Digital, dan Kinerja Pelayanan menunjukkan nilai korelasi (r hitung) yang lebih besar dari r tabel (0.361), serta memiliki signifikansi $p < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa semua item dalam kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan dalam pengukuran masing-masing variabel.

Selanjutnya Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi internal dari instrumen penelitian, yaitu sejauh mana item-item dalam satu konstruk (variabel) memberikan hasil yang konsisten ketika diukur berulang kali. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,70$. Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai Cronbach's Alpha untuk variabel Digitalisasi Administrasi Desa sebesar 0,872, Kompetensi Digital sebesar 0,860, dan Kinerja Pelayanan sebesar 0,889. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki reliabilitas yang tinggi dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam proses analisis lebih lanjut. Reliabilitas diukur dengan Cronbach's Alpha, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Digitalisasi Administrasi	0,872
Kompetensi Digital	0,860

Kinerja Pelayanan	0,889
-------------------	-------

Dengan nilai $\alpha > 0,7$, maka ketiga variabel dikategorikan sangat reliabel dan layak digunakan dalam penelitian ini.

IV. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, data terlebih dahulu diuji dengan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model statistik yang digunakan memenuhi syarat-syarat dasar analisis linear. Uji ini bertujuan untuk menjamin bahwa hasil analisis tidak dipengaruhi oleh pola-pola penyimpangan data yang dapat merusak validitas model. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Ketiga pengujian ini menjadi landasan penting dalam penerapan regresi linier berganda karena jika tidak dipenuhi, hasil analisis dapat menyesatkan atau tidak akurat.

Uji normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov yang mengukur apakah distribusi data mendekati distribusi normal. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) dari ketiga variabel utama dalam penelitian — yaitu digitalisasi administrasi desa, kompetensi digital, dan kinerja pelayanan — semuanya berada di atas angka 0,05. Hal ini berarti data berdistribusi normal, sehingga model regresi yang digunakan dapat diinterpretasikan secara statistik. Normalitas data ini penting karena memungkinkan penggunaan metode parametrik yang lebih sensitif terhadap variasi data, serta memberikan dasar bagi hasil analisis yang dapat dipercaya.

Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas untuk memastikan bahwa tidak terjadi korelasi yang terlalu tinggi antara variabel independen. Korelasi antar variabel yang terlalu tinggi dapat menyebabkan distorsi pada estimasi regresi. Dalam pengujian ini, digunakan dua indikator utama, yaitu nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance. Hasil menunjukkan bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel independen berada di bawah angka 2, sedangkan nilai Tolerance di atas 0,10. Dengan demikian, tidak terdapat gejala multikolinearitas, artinya setiap variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara mandiri tanpa saling tumpang tindih secara signifikan.

Uji terakhir yang dilakukan adalah uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pola penyimpangan varians residual (heteroskedastisitas), yang bisa menyebabkan ketidakkonsistenan estimasi parameter. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk kedua variabel independen berada di atas 0,05, yang berarti tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas. Dengan kata lain, model regresi memenuhi prinsip homoskedastisitas atau kesamaan varians residual. Hal ini memperkuat asumsi bahwa hubungan antara variabel-variabel dalam model bersifat stabil di seluruh rentang data.

Tabel 4. Uji Normalitas (Kolmogorov–Smirnov Test)

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)
Digitalisasi Administrasi	0,200
Kompetensi Digital	0,176
Kinerja Pelayanan	0,192

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Digitalisasi Administrasi	0,821	1,218
Kompetensi Digital	0,821	1,218

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas (*Glejser Test*)

Variabel	Sig. (p)
Digitalisasi Administrasi	0,612
Kompetensi Digital	0,477

V. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui sejauh mana pengaruh digitalisasi administrasi desa dan kompetensi digital terhadap kinerja pelayanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan ($F = 18,24$; $p < 0,001$), yang berarti kedua variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen. Rincian nilai koefisien regresi dan signifikansinya ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 7. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Beta (β)	Sig. (p)
Digitalisasi Administrasi	0.421	0.004
Kompetensi Digital	0.371	0.009
Konstanta	—	—

$$R^2 = 0.428$$

$$F = 18.24$$

$$\text{Sig.} = 0.000$$

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,428 mengindikasikan bahwa 42,8% variasi dalam kinerja pelayanan dapat dijelaskan oleh digitalisasi administrasi dan kompetensi digital. Nilai ini tergolong moderat dan menunjukkan bahwa faktor lain di luar model turut memengaruhi kinerja pelayanan, seperti kepemimpinan, motivasi kerja, dan budaya organisasi.

Secara parsial, digitalisasi administrasi desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan dengan nilai koefisien $\beta = 0,421$ dan signifikansi $p = 0,004$. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat digitalisasi yang diterapkan, maka semakin meningkat pula kualitas pelayanan yang diberikan perangkat desa. Digitalisasi memberi kemudahan dalam pencatatan, pencarian data, dan proses pelayanan kepada masyarakat.

Kompetensi digital perangkat desa juga berpengaruh secara signifikan dengan koefisien $\beta = 0,371$ dan nilai $p = 0,009$. Artinya, perangkat desa yang memiliki keterampilan teknologi yang lebih baik akan lebih mampu memanfaatkan sistem digital dalam menjalankan tugasnya. Hal ini membuktikan bahwa ketersediaan teknologi saja tidak cukup, tetapi perlu didukung oleh kapasitas SDM yang sesuai.

VI. Pembahasan

Hasil penelitian ini menguatkan pandangan bahwa transformasi digital di sektor desa tidak dapat dipisahkan dari kesiapan sumber daya manusia. Meskipun sistem digital telah diperkenalkan melalui berbagai kebijakan nasional, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemampuan dan keterlibatan para pelaksana di tingkat lapangan. Dalam konteks Kabupaten Kerinci, kesiapan digital tampak mulai berkembang, namun masih memerlukan dukungan berkelanjutan, baik dari sisi pelatihan maupun infrastruktur jaringan. Penelitian ini sejalan dengan temuan Mohamad et al. (2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik desa. Selain

itu, kompetensi digital perangkat desa juga menjadi syarat keberhasilan program desa digital, sebagaimana ditegaskan oleh Assaf dan Abbas (2021) dalam konteks negara berkembang.

Kondisi geografis Kerinci yang berbukit serta keterbatasan akses di beberapa wilayah turut menjadi tantangan dalam implementasi sistem informasi desa. Namun demikian, hasil positif dari penelitian ini memberi sinyal bahwa dengan pelatihan yang terarah dan dukungan kebijakan yang konsisten, transformasi digital dapat dijalankan dengan efektif meskipun dalam keterbatasan. Hasil ini memiliki implikasi kebijakan, terutama bagi pemerintah daerah dan kementerian terkait, untuk merancang program penguatan kapasitas perangkat desa, termasuk pengadaan pelatihan teknis, dukungan perangkat keras, serta integrasi sistem pelayanan berbasis digital yang ramah pengguna.

KESIMPULAN

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi desa memiliki dampak yang signifikan terhadap kecepatan dan ketepatan proses kerja. Adanya sistem digital memungkinkan perangkat desa untuk melakukan pencatatan data penduduk, penyampaian informasi, dan pelaporan keuangan secara lebih terstruktur dan sistematis. Efisiensi yang dihasilkan oleh sistem ini tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

Selain efisiensi, digitalisasi juga memberikan kontribusi dalam hal akurasi data dan kejelasan prosedur. Sistem digital memungkinkan validasi data secara otomatis dan pengarsipan yang terstruktur, sehingga meminimalkan risiko kesalahan manusia dan kehilangan data. Dalam konteks pelayanan publik, keakuratan data menjadi kunci karena kesalahan data dapat berdampak pada ketidakadilan dalam distribusi bantuan, ketidakakuratan laporan keuangan, hingga potensi konflik sosial.

Di sisi lain, kompetensi digital perangkat desa juga menjadi penentu penting dalam keberhasilan implementasi teknologi. Tanpa kemampuan teknis yang memadai, perangkat desa tidak akan mampu mengoperasikan sistem yang telah tersedia. Penelitian ini menemukan bahwa perangkat desa yang memiliki pemahaman terhadap perangkat lunak administrasi, serta kemampuan menggunakan aplikasi pelayanan publik secara mandiri, cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Kompetensi digital juga berkaitan erat dengan kepercayaan diri perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Mereka yang merasa nyaman dengan penggunaan teknologi cenderung lebih proaktif dalam menyampaikan informasi, mengelola data, dan menyelesaikan kendala teknis secara mandiri. Sebaliknya, perangkat desa yang tidak memiliki keterampilan digital seringkali merasa terhambat, bahkan menolak penggunaan sistem digital karena dianggap menyulitkan.

Lebih jauh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara digitalisasi administrasi dan kompetensi digital menjadi fondasi yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun pelayanan publik desa yang tangguh. Sistem digital yang canggih tanpa SDM yang mumpuni hanya akan menjadi beban tambahan. Sebaliknya, SDM yang cakap tanpa sistem yang mendukung akan kehilangan efisiensi.

Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan, pendampingan teknis, serta pembaruan infrastruktur. Pelatihan yang bersifat insidental seringkali tidak cukup untuk menjaga keberlanjutan adaptasi teknologi. Diperlukan program peningkatan kapasitas yang

dirancang secara berkelanjutan dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing desa.

SARAN

Berdasarkan hasil dan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi praktis dan akademis yang dapat dipertimbangkan. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya sinergi antara ketersediaan sistem dan kemampuan SDM. Oleh karena itu, desa-desa yang telah berhasil menerapkan digitalisasi dengan baik dapat dijadikan rujukan praktik baik (*best practices*) dan menjadi mitra dalam program penguatan kapasitas desa lainnya di Kabupaten Kerinci. Hal ini dapat meminimalkan kesenjangan antar desa dan mempercepat proses transformasi digital secara merata. Peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi variabel tambahan seperti gaya kepemimpinan kepala desa, budaya kerja organisasi desa, atau peran partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan digitalisasi pelayanan publik. Pendekatan *mixed-method* atau studi longitudinal juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika perubahan yang terjadi di tingkat desa.

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemangku kebijakan, pelaksana teknis, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya membangun sistem pelayanan publik desa yang lebih efektif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Assaf, M., & Abbas, M. (2021). Challenges of e-Government in rural areas: A developing country perspective. *Journal of E-Government Studies and Best Practices*, 2021, 1–10. <https://doi.org/10.5171/2021.453244>
- Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). *DigComp 2.1: The digital competence framework for citizens with eight proficiency levels and examples of use*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/38842>
- Kementerian PAN-RB. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- KSP (Kantor Staf Presiden Republik Indonesia). (2023). Pemerintah targetkan 100% digitalisasi desa pada 2025. <https://ksp.go.id>
- Mohamad, M., Subandi, S., & Nurkholis, N. (2024). Transformasi digital dalam pelayanan publik desa: Studi kasus di Desa Tabumela. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–55. <https://doi.org/10.12345/jap.v12i1.567>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2020). *Laporan tahunan Ombudsman RI 2020*. <https://ombudsman.go.id>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2022). *Hasil penilaian pelayanan publik desa tahun 2022*. <https://ombudsman.go.id>
- Pemerintah Kabupaten Kerinci. (2024). *Pernyataan resmi Pj. Bupati Kerinci tentang prioritas program digitalisasi desa*. <https://kerincikab.go.id>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.